

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 April 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS RISWANTO**
2. Jabatan : **KOMISARIS INDEPENDEN**
3. NHK : **19643**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **12.160.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m²/140 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 810.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/36 m² di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m²/200 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m²/500 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.750.000.000
5. Bangunan Seluas 6.58 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **400.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **594.722.005**



| | | |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 13.154.722.005 |
| III. HUTANG | Rp. | 52.369.838 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 13.102.352.167 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.